



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DLHK KOTA DENPASAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

#### 6.1. Pengukuran Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP sebagai indikator kinerja yang membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 6.1.2 Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga



terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.



IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.



Tabel 6.1  
Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					Kondisi akhir RPJMD
						2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan sewaka dharma	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan sewaka dharma	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan sewaka dharma	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100



			Percentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali	Percentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	%	80	84	86	88	88	90	90	90
			- Percentase peningkatan pengelolaan sampah dari 99,4% menjadi 99,8%	%	99,4	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,8	99,8
			- Percentase peningkatan pengelolaan sampah dari 99,4% menjadi 99,8%	%	99,4	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,8	99,8
			- Percentase sampah organik yang tereduksi : 20%	%	20	20	20	20	20	20	20	20
			- Percentase peningkatan kebersihan lingkungan : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100



			- Percentase kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dari 60% menjadi 100%	%	60	-	70	80	90	100	100
			- Percentase sampah an organik yang dikelola : 20%	%	20	20	20	20	20	20	20
5.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali	<b>Percentase penurunan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	%	92	92	93	94	95	95	95
			-Jumlah trophy adipura dari 1 buah menjadi 6 buah -Jumlah pembentukan desa sadar lingkungan dari 6 buah menjadi 11 buah	<b>Buah</b> <b>desa</b>	1 6	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	6 11
			Percentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu dari 9 parameter yang diukur : 100%,	%	100	100	100	100	100	100	100



			Persentase hasil uji kualitas air sungai , air laut dan kebisingan yang memenuhi baku mutu dari 15 parameter yang diukur : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian LH dari 60% menjadi 100%	%	60	60	70	80	90	100	100
			Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun diperusahaan penghasil LB3 dari 10 TPS menjadi 35 PTS	bh TPS	10	5	5	5	5	5	35
			% hasil uji kualitas air limbah produksi tahu tempe yang memenuhi baku mutu dari 4 parameter yang diukur : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah juara lomba sungai bersih dari 6 lokasi menjadi 36 lokasi dari 8 kriteria yang dinilai	lokasi	6	6	6	6	6	6	36
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL,SPPL) dari 1447 perusahaan menjadi 2447 buah perusahaan	buah	1447	200	200	200	200	200	2447
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan amdal dari 4 perusahaan menjadi 9 perusahaan	buah	4	1	1	1	1	1	9
			Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota dari 50 bh sekolah menjadi 75 bh sekolah -Jumlah sekolah adiwiyata propinsi dari 18 bh sekolah menjadi 33 bh sekolah - Jumlah sekolah adiwiyata nasional dari 4 sekolah menjadi 19 sekolah -Jumlah sekolah mandiri dari 8 bh sekolah menjadi 18 bh sekolah	buah	50/18/4/8	5/3/3/2	5/3/3/2	5/3/3/2	5/3/3/2	5/3/3/2	75/33/19/18
			Jumlah perusahaan yang mentaati pelaksanaan dokumen lingkungan dari 60 perusahaan menjadi 360 perusahaan	buah	60	60	60	60	60	60	360
			Persentase terlaksananya KLHS : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100



6.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali	Persentase cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%	92	93	93	94	95	95	95
			Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu dari 10 parameter yang diukur : 100%,	%	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah desa / kelurahan ekowisata dari 2 desa/kelurahan menjadi 3 desa / kelurahan	bh	2	2	3	3	3	3	3
			Jumlah penurunan emisi GRK dari 1291.590,36 Gg menjadi 1.291.390,36 Gg	Gg	1.291.590,36		1.291.540,36	1.291.490,36	1.291.440,36	1.291.390,36	1.291.390,36
			Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dari 3.756,65 Ha menjadi 3.256,65 Ha	Ha	3.756,65	3.656,65	3.556,65	3.456,65	3.356,65	3.256,65	3.256,65
			Jumlah jenis flora dan fauna yang diinventarisir terhadap 200 jenis flora dan 100 jenis fauna	Jenis flora/fauna	200/100	200/100	200/100	200/100	200/100	200/100	200/100



7.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali	Percentase luasan perindangan lahan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah luasan perindangan lahan dari 20 Ha menjadi 73,5 Ha	Ha	20	8	8	12,5	12,5	12,5	73,5



8.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	Terwujudnya tata ruang kota yang nyaman dan terkendali	Percentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah jenis informasi data kualitas lingkungan yang terpublikasi melalui jaringan website dari 3 jenis menjadi 3 jenis	jenis	3	3	3	3	3	3	3
			Percentase ketersediaan informasi status lingkungan hidup : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100



9.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	<b>Mengurangi degradasi lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat</b>	Persentase penurunan polusi lingkungan	%	93	-	94	94	95	95	95
			<b>Persentase hasil uji emisi kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu : 100%</b>	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase hasil uji emisi udara akibat aktifitas industri yang memenuhi baku mutu dari 9 parameter yang diukur	%	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100



10.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	<b>Mengurangi degradasi lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat</b>	Persentase luasan Terumbu Karang dan Padang lamun hidup	%	40	-	46	48	50	50	50
			Luasan terumbu karang dan padang lamun hidup dari 5 Ha menjadi 10 Ha	Ha	5	1	1	1	1	1	10



11.	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan trihitakarana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sanghyang Widhi Wasa	<b>Mengurangi degradasi lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat</b>	Percentase peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	%	80	84	86	88	90	90	90
			- Percentase peningkatan penataan dan pemeliharaan pohon penghijauan : 100%	%	100	100	100	100	100	100	100